



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

**NGOPENI.  
NGLAKONI.**  
*Jateng*

# LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN



**TAHUN 2025**  
SEMESTER II



@bangda\_jateng



bangda.jatengprov.go.id



BiroAdmBangdaProvJateng

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
I.1 LATAR BELAKANG.....	3
I.2 DASAR HUKUM.....	4
I.3 TUJUAN .....	4
I.3 TINDAK LANJUT EVALUASI INTERNAL SEMESTER I TAHUN 2025.....	5
BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	6
2.1 SOSIALISASI .....	6
2.2 IDENTIFIKASI.....	7
2.3 PENCEGAHAN.....	7
2.4 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	8
2.5 PELAPORAN.....	8
BAB III.....	9
EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	9
5.1 MONITORING DAN EVALUASI .....	9
5.2 RENCANA AKSI .....	9
BAB IV.....	10
PENUTUP.....	10

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Internal Benturan Kepentingan Semester II tahun 2025 lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Dalam rangka kegiatan evaluasi atas penanganan situasi benturan kepentingan dilakukan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu diciptakan lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku positif, kondusif dan terbebas dari adanya Benturan Kepentingan.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi kemajuan organisasi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pihak-pihak lain yang terkait. Demikian kami disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, Desember 2025

**Plt KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**



**Temmy Purboyono, ST, DH, MM, MT**

Pembina Tk I

NIP.\_19730106 199903 1 010

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sangat diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintah yang berwibawa , bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Efektif serta efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain diisyaratkan untuk memiliki profesionalisme setiap penyelenggara negara juga harus mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Komitmen Reformasi Birokrasi di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta terbebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku yang mengarah kepada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satunya adalah kondisi dimana organisasi terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Terkait dengan interaksi tersebut, seringkali terjadi benturan kepentingan dalam diri seorang pegawai khususnya di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimana pertimbangan pribadi

mempengaruhi dan atau dapat menyingkirkan profesionalisme seorang pegawai dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Untuk mencegah masalah tersebut Biro Administrasi Pembangunan Daerah menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya benturan kepentingan pada unit organisasi maupun pejabat/pegawai di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Penanganan benturan kepentingan diharapkan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika hubungan interaksi yang baik antar pihak.

## **I.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **I.3 TUJUAN**

Tujuan evaluasi internal Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah:

1. Mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Laporan terhadap kinerja terhadap kinerja penanganan benturan kepentingan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pedoman perbaikan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **I.4 TINDAK LANJUT EVALUASI INTERNAL SEMESTER II TAHUN 2025**

Tindak lanjut dan evaluasi di internal biro dilaksanakan melalui sosialisasi dalam rapat rapat internal Biro dan juga melalui konten konten yang di publikasi dalam Media Sosisl Biro yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang Benturan Kepentingan kepada masyarakat dan juga kepada Pegawai dalam Biro itu sendiri. Agar dapat mengurangi bahkan menghapus praktik praktik terjadinya benturan kepentingan antar pegawai maupun antara masyarakat dengan pemangku kepentingan di tingkat Biro Adminstrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **2.1 SOSIALISASI**

Pelaksanaan sosialisasi penanganan benturan kepentingan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi budaya kerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana nilai integritas merupakan salah satu poin budaya kerja. Selain itu sosialisasi juga dilaksanakan dalam bentuk lainnya berupa pemasangan standing banner, publikasi terkait bentuk-bentuk benturan kepentingan melalui papan pengumuman juga membuat konten konten yang menegaskan tentang benturan kepentingan di media sosial Biro Administrasi Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan keikutsertaan pegawai Administrasi Pembangunan Daerah pada MOOC Anti Korupsi yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu juga telah dibuka kanal pelaporan atau layanan *Whistle Blowing System* (WBS) internal Biro Bangda dan untuk masyarakat sebagai wadah pengaduan apabila diindikasikan terjadi benturan kepentingan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Mempermudah pelaporan dari masyarakat apabila masyarakat melihat praktik praktik yang merujuk kepada pelanggaran benturan kepentingan. Agar supaya praktik praktik benturan kepentingan di lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah khususnya dan umumnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diminimalisir dan juga dapat dihapuskan.

## 2.2 IDENTIFIKASI

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi benturan kepentingan pada semester II tahun 2025 yang hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan**  
**Semester II Tahun 2025**

No	Jenis Benturan	Pejabat/ Pegawai yang Terkait	Detail Benturan Kepentingan	Penyebab	Upaya Pencegahan
1.	Gratifikasi	Bagian PAPP, PAPPW, PAPPD dan juga SKPD Pelaksana Kegiatan	Pelaksana kegiatan memberi Gratifikasi kepada pengampu agar laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja baik.	kurang pemahaman terkait bentuk-bentuk gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan kepada Pelaksana Kegiatan Maupun Pengampu. 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum

## 2.3 PENCEGAHAN

Pencegahan yang sudah dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan.
2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum.
3. Membuat kanal pelaporan pengaduan gratifikasi/layanan *Whistle Blowing System* (WBS).
4. Membentuk Satgas Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Membuat SOP Penanganan Benturan Kepentingan.
6. Penekanan Konten Konten tentang benturan kepentingan di Media Sosial Biro

## 2.4 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Adapun penanganan benturan kepentingan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah adalah pelaporan oleh pihak lain yang mengetahui terjadinya benturan kepentingan melalui layanan *Whistle Blowing System* (WBS) Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Kemudian pengelola layanan WBS meneruskan laporan tersebut kepada pimpinan. Namun sampai dengan saat ini, tidak terdapat laporan pada *Whistle Blowing System* (WBS) yang berkaitan dengan benturan kepentingan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

## 2.5 PELAPORAN

Tidak ditemukan adanya laporan terjadinya benturan kepentingan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah pada semester II tahun 2025.

**Tabel 2.2**

**Matriks Permasalahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Subbagian Tata Usaha Biro	Nihil
2	Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN dan APBD	Nihil
3	Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah	Nihil
4	Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	Nihil

## **BAB III**

### **EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **6.1 MONITORING DAN EVALUASI**

Adapun hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Secara garis besar Biro Administrasi Pembangunan Daerah telah melaksanakan langkah pencegahan maupun mekanisme penanganan sesuai dengan ketentuan.
2. Tidak ditemukan terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada semester I tahun 2025.
3. Identifikasi potensi benturan kepentingan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah perlu dikembangkan lagi dan mencakup seluruh unit kerja.

#### **6.2 RENCANA AKSI**

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka penanganan benturan kepentingan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan peningkatan pemahaman anti korupsi.
2. Membentuk tim satgas penanganan benturan kepentingan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah.
3. Mensosialisasikan tentang benturan kepentingan kepada Pegawai di Tingkat Biro.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penanganan benturan kepentingan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, namun membutuhkan kontribusi dan keterlibatan dari seluruh pihak di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani benturan kepentingan harapannya kedepan akan terwujud organisasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang kemudian mewujudkan pula pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan pemerintahan yang baik (*good government*).

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan pengawasan dan perbaikan kualitas Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami terhadap Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Semoga laporan ini dapat membawa manfaat dalam pengendalian benturan kepentingan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Desember 2025

**Plt KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**



**Temmy Purboyono, ST, DH, MM, MT**

Pembina Tk I

NIP.\_19730106 199903 1 010

# LAMPIRAN





